

BAB I

PENDAHULUAN

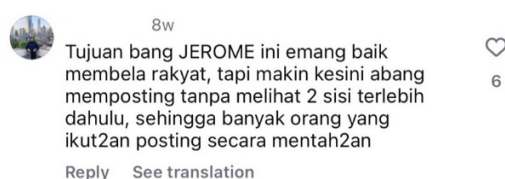
1.1 Latar Belakang

Isu politik yang paling ramai di bicarakan di Indonesia saat ini adalah terkait ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan negara pasca pemilu 2024. Banyak kondisi di pemerintahan Indonesia yang membuat rakyat kecewa hingga terjadi demo-demo besar di berbagai kota, sehingga melahirkan sebuah tuntutan 17 + 8 yang digerakkan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis. Gerakan tersebut menjadi perbincangan publik dan berkembang menjadi kampanye yang kreatif yang banyak digerakkan oleh berbagai kalangan salah satunya Gen Z di media sosial, khususnya Instagram. Kampanye tersebut memberi dukungan melalui unggahan *story* dan *feeds*, menggunakan simbol hijau & pink sebagai bentuk perlawanan. Media sosial dipilih menjadi wadah kampanye ini karena dianggap efektif dalam penyebaran informasi yang cepat dan dapat membangun kesadaran tentang krisis yang terjadi (Mardini et al., 2024).

Jika sebelumnya partisipasi pada sebuah isu harus turun ke jalan ataupun membentuk suatu forum yang formal, Gen Z ini menjadikan internet sebagai arena utama mereka. Gen Z banyak bersuara di media sosial mereka dengan menyuarakan terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat, contohnya adalah isu politik. Berbeda dengan generasi milenial, saat terjadinya demo besar pada tahun 1998 mereka hanya bisa bersuara melakukan perlawanan hanya turun langsung ke jalan atau melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan koran. Bahkan, Soeharto, presiden saat itu, membredel majalah tempo yang membuat mereka semakin sulit

untuk bersuara dan dianggap sebagai kegagalan demokrasi (Widyanto, 2017). Maka dari itu, Gen Z dianggap beruntung dapat mengakses internet ataupun media sosial sebagai wadah mereka dalam berekspresi dan juga berpendapat terhadap isu-isu publik (Natalia et al., 2025). Hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat pada sebuah isu dapat di suarkan dengan cara yang paling mudah dan praktis.

Meskipun banyak Gen Z berpartisipasi dalam kampanye tersebut, tidak seluruh Gen Z memiliki pandangan yang sama terhadap tuntutan 17 + 8. Sebagian lainnya menganggap bahwa kampanye ini tidak memenuhi keinginan rakyat sepenuhnya. Perbedaan terhadap pemaknaan pada pesan inilah yang menekankan bahwa penting untuk dilakukan penelitian analisis gen Z terhadap *digital activism* tuntutan 17 + 8 di media sosial Instagram. Penelitian ini memerlukan teori *encoding-decoding* dari Stuart Hall yang menjelaskan bahwa setiap khalayak memiliki penerimaan yang berbeda dalam menafsirkan suatu pesan di sebuah media (Delya et al., 2022).



Gambar 1. 1 Komentar Tentang Tuntutan 17 + 8 di Postingan Instagram @jeromepolin



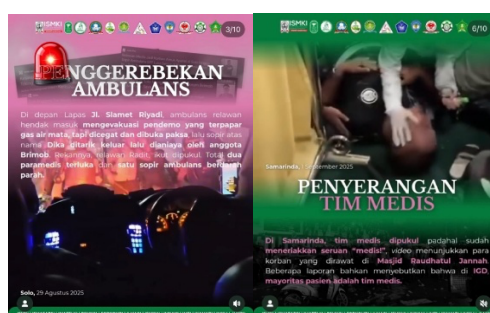
Gambar 1. 2 Komentar Makna *Brave pink & Hero green* di Instagram @jeromepolin

Tuntutan 17 + 8 terdiri atas 17 poin jangka pendek yang diberi *deadline* pada 5 September 2025, dan 8 poin jangka pendek yang diberi *deadline* pada 31 Agustus 2026. Tuntutan ini diberikan kepada Presiden Prabowo, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Terdapat sebuah web yang berisi informasi lengkap tentang tuntutan 17 + 8 dan terkait *update* pelaksanaannya, yaitu <https://bijakmemantau.id/tuntutan-178>. Adapun rincian 17 tuntutan yang telah di sebarluaskan di internet maupun media sosial dengan *deadline* 5 September 2025

Tuntutan 17 + 8 ini muncul setelah terjadinya demo besar-besaran yang di mulai pada tanggal 25 Agustus 2025 di Gedung DPR Jakarta (Bestari, 2025). Demo tersebut berawal dari marahnya masyarakat akan kenaikan gaji DPR. Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan dinilai tidak etis mengingat keadaan ekonomi sulit yang tengah dialami oleh masyarakat. Empati dari anggota DPR juga tidak terlihat akan keresahan masyarakat ini, sehingga terjadilah demo yang dihadiri oleh banyak kalangan, seperti mahasiswa, ojol, pedagang, sampai pelajar. Fokus dari demo ini adalah menyuarakan untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Namun, bentrokan terjadi antara massa dan polisi yang menyebabkan pihak kepolisian menyemprotkan gas air mata kepada massa membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Tindakan anarkis dan intimidasi yang dilakukan polisi juga menjadi kecaman masyarakat karena tidak hanya demonstran, jurnalis, tenaga medis dan ambulans juga menjadi sasaran polisi. Banyak beredar bukti video tindakan anarkis

tersebut di media sosial yang membuat masyarakat semakin geram dengan tindakan polisi. Kejadian ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa polisi tidak menjalankan tugas mereka secara profesional. Alih-alih melakukan pendekatan secara persuasif, polisi melakukan tindakan represif yang mana makin memperkeruh situasi dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat dengan polisi.



Gambar 1. 3 Postingan Instagram @ismki_indonesia

Salah satu jurnalis foto dari Kantor Berita Nasional Antara yang Bernama Bayu Pratama, mengaku telah dipukul oleh polisi di sekitar Gedung DPR Jakarta pada hari Senin, 25 Agustus 2025 (Aswara, 2025). Bayu mengatakan bahwa polisi memukulnya beberapa kali menggunakan tongkat dengan kondisi Bayu membawa dua kamera dan memakai ID Card. Bayu mengaku tangan kirinya lecet dan kameranya mati akibat pukulan dari polisi. Bayu menyangkan tindakan represif polisi dan tidak dapat membedakan jurnalis dan pendemo.

Situasi mulai memanas pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 ketika mobil taktis milik brimob melaju dengan cepat untuk membubarkan massa dan melindas *driver* ojol di Pejompongan saat malam hari lalu kabur begitu saja (Bestari, 2025). Kejadian tersebut terekam oleh kamera dan video tersebut menyebar di media sosial. Tidak hanya rakyat biasa, para artis dan *influencer* turut membagikan video

itu di media sosial yang membuat video tersebut menjadi tersebar semakin luas di media sosial. Terdapat dua korban, yaitu Affan Kurniawan yang meninggal dunia, dan Moh Umar Amarudin dengan keadaan terluka dan di beri perawatan di RSCM. Kejadian tersebut membuat keadaan semakin ricuh, membuat sejumlah massa terutama driver ojol mengepung Markas Komando Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat hingga esok hari. Peristiwa memilukan tersebut membuat masyarakat memberikan tuntutan baru terhadap pemerintah, yaitu meminta keadilan ditegakkan dengan menangkap pelaku penabrak Affan dan Umar hingga rentetan tindakan anarkis polisi saat mengawal demo sejak hari pertama, yaitu Senin, 25 Agustus 2025.

Insiden meninggalnya *drivel* ojol Affan menimbulkan simpati yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Demo di berbagai kota menjadi semakin rusuh dipicu amarah warga akan kematian Affan yang melebar kemana-mana hingga banyak bangunan yang terbakar dan fasilitas umum dirusak. Salah satu Gedung yang di bakar adalah Gedung Grahadi Surabaya yang terletak di Jalan Raya Gubernur Suryo pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Menurut laporan Tempo, Gedung Grahadi terbakar pada pukul 21.50 WIB akibat aksi ribuan orang yang melakukan demo di depan gedung tersebut. Kebakaran tersebut berlangsung satu jam setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui para demonstran di depan Gedung Grahadi (Septiana, 2025).

Banyaknya kejadian yang semakin ricuh, membuat beberapa *influencer* tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Salah satu diaspora asal Indonesia di Denmark yang cukup

vokal akan kejadian demo-demo di Indonesia, Salsa Erwina, mengatakan di wawancara bersama Kompas Newsroom bahwa ia di hubungi oleh Jerome Polin, youtuber asal Indonesia, untuk menggarap beberapa tuntutan melalui telepon selama 3 jam bersama para *influencer* seperti Andovi da Lopez (youtuber), Fathia Izzati (penyanyi), Abigail Limuria (aktivis), Andhyta Utami (aktivis) dan NGO (*Non-Governmental Organization*) yang ditujukan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia (Maharani, 2025). Akhirnya, terbentuklah tuntutan 17 + 8 yang di posting di media sosial Instagram pada tanggal 31 Agustus 2025 oleh akun @afutami dan kolaborasi dengan akun penggerak tuntutan ini lainnya.



Gambar 1. 4 Postingan Instagram @afutami

Terdapat beberapa tuntutan yang tidak di ambil dari kejadian demo sejak 25 Agustus, contohnya adalah kembalikan TNI ke barak dan mengesahkan UU perampasan aset. Rakyat telah menolak revisi UU TNI yang di khawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI melalui penempatan perwira aktif di lembaga pemerintahan dan keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan sipil, hingga

muncul tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk protes rakyat yang viral di media sosial X pada hari Senin, 17 Februari 2025 (Clairine et al., 2025). Lalu pentingnya segera mengesahkan UU perampasan aset yang sudah hampir satu dekade lalu tidak tersentuh, karena dengan adanya RUU tersebut negara dapat lebih mudah menyita aset koruptor tanpa menunggu putusan final pidana (Adam, 2025). Mencantumkan tuntutan yang tidak berlangsung saat demo tersebut, membuktikan bahwa masih ada tuntutan dari rakyat yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Beredarnya awal mula postingan tuntutan 17 + 8 di akun Instagram @afutami, terlihat bahwa kombinasi warna pink hijau di gunakan dalam *flyer* tuntutan 17 + 8. Sampai akhirnya kedua warna tersebut di artikan sebagai *brave pink* dan *hero green*. Kedua warna tersebut kemudian dijadikan sebagai simbol solidaritas dan perlawanan selama demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Warna pink diambil dari sosok ibu berhijab warna pink yang aksinya viral di media sosial saat melakukan demonstrasi dengan berani, menjadikan sebuah ikon optimisme dan perlawanan. Sedangkan untuk warna hijau diambil sebagai bentuk penghormatan dan rasa duka kepada driver ojol Affan yang meninggal terlindas mobil taktis milik brimob saat berlangsungnya demo (Wicaksono, 2025).



Gambar 1. 5 Foto Profil Instagram *Brave pink* dan *Hero green* @kittendust



Gambar 1. 6 Foto Profil Instagram *Brave pink* dan *Hero green* @akbarry

Instagram menjadi salah satu media sosial yang menjadi wadah dalam melakukan kampanye tuntutan 17 + 8 dalam menggunakan warna pink dan hijau. Banyak akun Instagram beramai-ramai menggunakan foto profil mereka diganti menjadi latar hijau dan pink. Tak hanya foto profil, postingan maupaun *template* Instagram *story* yang berupa poster digital yang berisi tuntutan 17 + 8 pun juga menggunakan latar pink hijau. Telah dibuktikan pada sebuah penelitian bahwa sebuah warna yang dimasukkan dalam sebuah pesan politik efektif untuk digunakan (Maestre & Medero, 2024). Aksi sederhana tapi bermakna tersebut menjadi bentuk nyata dari *digital activism* dalam ranah media sosial yang memperluas dampak kampanye ke ruang publik digital.

Digital activism adalah sebuah gerakan aktivisme yang menggunakan teknologi seperti media sosial untuk menyuarakan dan melakukan perubahan pada suatu isu sosial dan politik (Rachimoellah, 2024). Gerakan aktivisme di ruang digital dapat dikatakan sebagai *digital activism* ketika gerakan tersebut dapat memengaruhi opini publik dan bergerak secara masif. Adanya partisipasi publik terhadap *digital activism* telah membuktikan bahwa gerakan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran publik (Priageng et al., 2024). *Digital activism* memiliki kemampuan dalam menyatukan berbagai masyarakat dari berbagai kalangan di ruang digital dan saling berinteraksi, memakai tagar agar mudah dicari,

menggunakan konten visual seperti poster digital, dan penyebarannya secara cepat melalui media sosial. Penilaian dari *digital activism* sendiri adalah melalui sebuah *insight* yang ada di media sosial, seperti jumlah *like*, *comment*, dan *share*, frekuensi unggahan, dan seberapa banyak yang berpartisipasi dalam tagar, dan sejauh mana gerakan tersebut menyebar di media sosial.

Digital activism di Instagram telah berkembang menjadi bentuk partisipasi sosial yang sangat visual, cepat, dan interaktif. Kegiatan ini hadir tidak hanya lewat unggahan pada *feeds*, tetapi juga melalui langkah-langkah sederhana seperti *share*, *like*, mengomentari konten spesifik, dan menyebarkan informasi melalui Instagram *story*, yang semua itu berperan dalam memperluas penyebaran pesan. Contoh nyata dari hal ini terlihat dalam kampanye global *#BlackLivesMatter* yang menunjukkan bagaimana Instagram berperan sebagai saluran advokasi visual yang sangat berpengaruh. Melalui penelitian (Korhonen, 2022), kampanye *#BlackLivesMatter* memanfaatkan Instagram sebagai ruang utama untuk membangun *digital activism* berbasis visual. Melalui analisis multimodal, ia menemukan bahwa konten di Instagram, mulai dari foto wajah korban hingga narasi emosional berfungsi untuk membentuk solidaritas emosional dan mobilisasi publik. Aktivitas *post*, *share*, *like*, *comment*, dan penggunaan narasi visual menjadikan Instagram efektif dalam mengubah kemarahan dan kesedihan menjadi aksi kolektif yang memperkuat tuntutan keadilan. Oleh karena itu, untuk berpartisipasi dalam sebuah *digital activism*, pengguna banyak menyesuaikan fitur dan fungsionalitas Instagram dengan sesuai agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Instagram memiliki ciri khas *digital activism* yang berbeda dibandingkan dengan platform media sosial lainnya seperti Twitter (X) atau TikTok. Twitter (X) lebih fokus pada teks, sedangkan TikTok berfokus pada video pendek dengan algoritma *For Your Page* (fyp). Instagram mengambil posisi di antara keduanya, yaitu mengombinasikan daya tarik visual yang menarik dan mudah untuk dibagikan, sembari tetap menawarkan ruang untuk narasi yang lebih mendalam melalui *caption* dan *carousel*. Evolusi Instagram yang secara teratur memperkenalkan fitur-fitur baru seperti *explore*, *top and recent hashtag*, *stories*, *polls*, *question box*, *reels*, *IGTV*, *collaboration feed*, tidak hanya memungkinkan Instagram tetap di puncak dalam kompetisi eksistensi platform media sosial, tetapi juga semakin memudahkan para aktivis untuk meningkatkan *organic follower* pada akun Instagram mereka agar dapat berinteraksi dan menyebarkan isu yang mereka advokasikan (Rochmawati & Alamiyah, 2024).

Gerakan tuntutan 17 + 8 dipilih dalam penelitian ini karena merupakan salah satu fenomena *digital activism* paling signifikan di Indonesia tahun 2025 yang memperlihatkan mobilisasi publik besar-besaran melalui Instagram. Gerakan ini menyebar sangat cepat melalui berbagai bentuk *digital activism* seperti perubahan foto profil menjadi warna pink dan hijau, unggahan poster digital di *story* maupun *feeds*, hingga percakapan intens dalam kolom komentar. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana Instagram dapat menjadi ruang bagi partisipasi politik masyarakat, sekaligus menunjukkan keragaman bentuk *digital activism* (Phitaloka & Purwaningtyas, 2021). Mulai dari penggunaan latar warna pink dan hijau, posting

feeds dan *story* berupa penjelasan yang mengedukasi, hingga *like*, *comment*, *repost*, dan *share*.

Fenomena *digital activism* dalam kampanye tuntutan 17 + 8 menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, termasuk Gen Z, bukan karena isiuntutannya saja, tetapi karena caranya disebarakan melalui media sosial, khususnya Instagram. Di satu sisi, banyak yang memandang digital activism ini sebagai bentuk partisipasi politik yang modern, cepat, dan inklusif. Aktivitas seperti mengganti foto profil menjadi pink-hijau, membagikan poster digital di Instagram *story*, mengunggah penjelasan di *feeds*, serta berdiskusi melalui kolom komentar dianggap mampu membangun solidaritas kolektif dalam waktu singkat. Praktik simbolik ini dipahami sebagai cara baru bagi masyarakat terutama Gen Z untuk menunjukkan posisi politik mereka tanpa harus turun ke jalan. Namun, di sisi lain, terdapat kritik yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk *digital activism* ini terlalu dangkal dan hanya berorientasi pada tren tanpa upaya lebih lanjut untuk perubahan, biasa disebut dengan *slacktivism* (Fazrina et al., 2025).

Pro-kontra pada *digital activism* tuntutan 17 + 8 inilah menarik untuk diteliti, karena ia membuka ruang analisis mengenai bagaimana Gen Z memahami, merespons, dan memaknai *digital activism* yang sifatnya cepat, visual, dan viral. Apakah mereka menerima sepenuhnya, menegosiasikan maknanya, atau justru menolaknya menggunakan teori dari (Hall, 1973). Tidak semua Gen Z ikut mendukung, beberapa menganggapnya sebagai bentuk distrupsi terhadap pemerintah. Terhadap konteks ini, resepsi Gen Z terhadap kampanye tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana penerimaan

mereka terhadap pesan politik dan sebuah simbol. Melalui analisis resepsi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana penerimaan dan interpretasi Gen Z terhadap tuntutan 17 + 8, serta bagaimana media sosial, khususnya Instagram, menjadi ruang baru bagi wadah partisipasi dan kesadaran sosial pada generasi muda di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu :Bagaimana penerimaan Gen Z terhadap *digital activism* Tuntutan 17 + 8 yang mereka lihat di Instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerimaan Gen Z terhadap *digital activism* Tuntutan 17 + 8 yang mereka lihat di Instagram.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya literatur bagaimana sebuah pesan politik diterima dan diinterpretasikan oleh Gen Z dalam kampanye di media sosial.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori resepsi Stuart Hall.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dan lembaga sosial dalam memahami pola penerimaan Gen Z terhadap isu sosial dan politik, sehingga komunikasinya dapat disusun dengan lebih efektif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat sebuah kampanye digital agar lebih kreatif dan sesuai dengan target sasarannya di media sosial.